

BAB III

DINAMIKA PARTAI – PARTAI ISLAM PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Kondisi Partai – Partai Islam Pasca Pemilu 1955

Kemerdekaan Indonesia membuka babak baru sejarah perkembangan politik Islam di Indonesia. Umat Islam menunjukkan peran yang besar dan strategis dalam meraih, mempertahankan, hingga mengisi kemerdekaan.³⁹ Pada masa awal-awal kemerdekaan, Sebagian kalangan umat Islam khususnya dari golongan modernis Masyumi menghendaki landasan negara berdasar Islam.⁴⁰ Meski begitu, kehendak tersebut tidak berhasil diwujudkan karena mendapat tantangan dari golongan lain maupun kurangnya dukungan dari kalangan Islam sendiri (kelompok tradisional). Memasuki tahun politik 1950-an, Masyumi harus merelakan keluarnya keanggotaan NU dan mendirikan partai politik sendiri.⁴¹

Kedua partai Islam ini kemudian tampil sebagai dua dari empat partai besar hasil pemilihan umum 1955. Meski demikian, tampak keduanya memiliki pandangan dan sikap politik yang berbeda-beda, terutama saat masa Demokrasi Terpimpin. Masyumi melalui tokohnya seperti Moh. Natsir lebih menunjukkan sikap non-kooperatif terhadap pemerintah, sebaliknya dengan NU misalnya melalui K.H. Saifuddin Zuhri yang lebih memilih bersikap kooperatif dan bahkan menjadi barisan pendukung pemerintah.⁴² Adapun wacana politik yang berkembang akhir tahun 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-an

³⁹ Deliar Noer, *Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas?*, dalam Prisma, No.5, Tahun XVII, 1988, hlm.10-11.

⁴⁰ Afan Gaffar, “*Politik Akomodasi: Islam dan Negara di Indonesia*”, dalam Majalah Prospektif, No.1, Vol.4, 1992, hlm. 67.

⁴¹ M. Rusli Karim, *Konflik Islam Kontemporer di Indonesia: Berbagai Variasi dan Kerumitannya*, dalam Prisma, No.5, Edisi Mei 1995, hlm. 49.

⁴² Ahmad Syafii Maarif, *Islam di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin*, dalam Prisma, No.5, Tahun XVII, 1988, hlm. 35.

terlihat dipengaruhi oleh kondisi social politik dan ideologi yang ada saat itu. Melalui Dekret Presiden 1959, Soekarno membuka awal dimulainya sistem Demokrasi Terpimpin beserta Manifestasi Politiknya sebagai garis besar Haluan negara. Seiring perkembangannya, peta politik di Indonesia kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok ideologi berbeda yakni nasionalis, agama (Islam), dan komunis. Suasana persaingan politik antar kelompok ideologi juga memasuki ranah kebudayaan. Lahirnya Lekra yang kemudian menjalin kedekatan dengan kelompok komunis (PKI), memicu kelompok lain khususnya Islam bergerak dalam bidang yang sama yakni kebudayaan melalui Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), bahkan ada pula yang secara khusus melahirkan organisasi kebudayaan Islam sebagai bagian dari partai politiknya yaitu Lesbumi oleh NU tahun 1962.⁴³

Tajamnya persaingan ideologi, terutama kelompok Islam dengan kelompok komunis, menemui puncaknya menjelang akhir tahun 1965 dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September. Bersumbu dari peristiwa itu membuat Angkatan Darat (bersama dan didukung kelompok Islam) melakukan langkah-langkah penghancuran terhadap komunis dan juga terhadap kekuasaan Presiden Soekarno beserta pemerintahan Orde Lamanya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan di antaranya dengan melalui sarana pers-pers Islam.

Kemerdekaan, upaya telah dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk membangun berbagai infrastruktur pemerintahan untuk mendukung negara demokrasi, termasuk keinginan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipilih oleh rakyat sendiri. Sekitar dua bulan setelah proklamasi, pemerintah membentuk Komite Nasional Pusat (KNP), yang juga dikenal sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang bertugas melaksanakan tugas legislatif DPR dan MPR.

⁴³ Choerotun Chisaan, Lesbumi: *Strategi Politik Kebudayaan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, .

³¹ Choerotun Chisaan, "*Pencaria Identitas Kebudayaan Islam Indonesia 1956-1965*", dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (ed.), *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2011), hlm. 332-333.

Untuk mempercepat terwujudnya pemilu, Wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden X tanggal 16 Oktober 1945 tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada KNP. Berdasarkan isi maklumat ini sangat jelas terlihat keinginan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan Pemilu. Pada bulan November, sekitar satu bulan kemudian pemerintah mempertegas keinginan untuk menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946 dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang salah satunya berisi tentang anjuran pembentukan partai-partai politik (Kementerian Penerangan RI, 1951: XI). Adanya anjuran pemerintah untuk segera melakukan pembentukan partai-partai politik didasari pemikiran dan harapan bahwa partai-partai politik itu nantinya akan dapat membantu memperkuat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.

Dalam maklumat itu ditegaskan pula bahwa pemerintah menyukai lahirnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham/ideologi yang ada di masyarakat dapat dipimpin/diarahkan ke jalan yang teratur. Oleh sebab itu, pemerintah agar partai-partai politik tersebut telah terbentuk, sebelum dilangsungkan pemilihan anggota MPR dan DPR pada bulan Januari 1946. Dalam rangka mendukung maklumat itu, pemerintah kemudian membentuk Kantor Pusat Pemilihan (KPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pembentukan Kantor Pusat Pemilihan untuk Menjalankan Administrasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1946 dan ditandatangani Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta.

Kendati demikian, Pemilu baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955 dimana pelaksanaan pemilu berbeda dengan Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik yang menyebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Sedangkan Pemilu 1955 yang dilaksanakan sebanyak dua kali itu

yakni pertama untuk memilih anggota-anggota DPR yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan pemilu kedua, yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Sementara itu, sebelum masa kemerdekaan beberapa organisasi dan partai politik telah terbentuk, seperti De Indische Partij yang didirikan oleh tiga serangkai tokoh intelektual Indonesia, yakni E.F.E. Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo pada tanggal 25 Desember 1912. Berdiri pula Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1923 yang merupakan penerus dari organisasi Sarekat Dagang Islam (1911) yang didirikan Samanhoedi yang kemudian dibesarkan oleh H.O.S. Cokroaminoto. Organisasi ini kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (1912). Pada tahun 1929, PSI kembali berganti nama menjadi PSII dalam upaya untuk lebih menegaskan sikap nasionalismenya. Selain itu, berdiri Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam pidatonya, D.N. Aidit menjelaskan kelahiran PKI didahului oleh berdirinya serikat buruh kereta-api yang bernama SS Bond dalam tahun 1905. Pada 1908 kemudian berdiri pula VSTP (Verenigingen van Spooren Tram Personeel), sebuah serikat buruh kereta api yang militan. Namun dalam perkembangannya, kemajuan kesadaran kelas buruh Indonesia sudah menghendaki organisasi yang tidak hanya membatasi diri pada perjuangan serikat buruh. Bulan Mei 1914 di Semarang berdirilah “Indische Sociaal Democratische Vereeniging” (ISDV) yang didirikan oleh Henk Sneevliet. ISDV inilah yang pada tanggal 23 Mei 1920 melebur diri menjadi PKI. PKI adalah sintese daripada gerakan buruh Indonesia dengan Marxisme-Leninisme dan dijiwai Revolusi Sosialis Oktober 1917 di Rusia.

Selanjutnya, berdiri pula Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juni 1927. Partai ini didirikan oleh para anggota “Bandung Studie Club” di bawah pimpinan Soekarno bersama Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo sebagai sekretaris. Selain itu terdapat pula tokoh terkemuka seperti Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Mr. Budiarto, Mr. Sartono, Mr. Ali Sastroamidjojo, Dr. Sasmi Sastrowidagdo dan Mr. Sunarjo). Selain itu, berdiri pula organisasi keumatan, diantaranya Muhammadiyah (18 November 1912) di Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. “Muhammadiyah” secara bahasa berarti “pengikut Nabi Muhammad” yang menurut H.

Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian bahwa untuk menjelaskan jika pendukung organisasi Muhammadiyah adalah umat Muhammad, dan azasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya didirikan pula Nahdlatul Ulama yang merupakan representasi ulama tradisional, dengan haluan ideologi ahlu sunnah waljamaah dengan tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari. Pada awal berdirinya NU bukan merupakan partai atau organisasi politik, melainkan sebuah jam'iyah diniyah atau organisasi sosial keagamaan. Namun, walaupun bukan organisasi politik, dimensi politik dalam aktifitas NU tidak kecil, terutama karena dalam tujuan pendiriannya sejak awal telah terkandung muatan politik, yaitu penggalangan nasionalisme di tengah iklim kolonial saat itu. Dalam perkembangannya kemudian, kedua organisasi keumatan/keagamaan yang disebut terakhir ini kemudian meleburkan diri ke dalam sebuah wadah kepartaian yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Saat berada di dalam satu wadah inilah, kemudian banyak gejolak politik yang terjadi, yang salah satunya menyebabkan NU harus keluar dari Masyumi dan kemudian mendirikan partai sendiri dengan nama Partai Nadhatul Ulama.⁴⁴

Perseteruan di tubuh Masyumi yang menyebabkan NU harus meninggalkan partai Islam terbesar di masa itu melahirkan banyak spekulasi tentang adanya perebutan jabatan atau pengaruh, serta memunculkan berbagai pertanyaan, seperti apa dinamika yang terjadi di tubuh Masyumi? Apa sesungguhnya yang membuat NU harus meninggalkan Masyumi dan membuat partai sendiri? Bagaimana proses NU keluar dari Masyumi dan siapa tokoh yang getol dalam memperjuangkan NU keluar dari Masyumi? Beberapa pertanyaan inilah yang akan diuraikan di dalam tulisan ini. Dengan melacak dari berbagai sumber dan mengurai dinamika politik yang terjadi di dalam tubuh Masyumi, akan terlihat dengan jelas bagaimana sesungguhnya perseteruan NU, saat masih bergabung di dalam Partai Masyumi, hingga menjelang Pemilu 1955. Sejarah pada dasarnya mempunyai kegunaan secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah itu berguna sebagai pengetahuan,

⁴⁴ Anwar, I. (2020). *Tulang Punggung Dipunggungi: Pecah Kongsi Nu-Masyumi Jelang Pemilu 1955*. Al-Qalam, 26(2), hlm 354-356.

sedangkan secara ekstrinsik yaitu kebermanfaatan di luar dirinya. Setidaknya ada empat guna sejarah secara intrinsik, yaitu (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi. Secara umum sejarah mempunyai fungsi pendidikan yaitu sebagai pendidikan (1) moral, (2) penalaran. (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, dan (8) ilmu bantu. Selain sebagai pendidikan, sejarah juga berfungsi sebagai (9) latar belakang, (10) rujukan, dan (11). Tujuan dan manfaat penelitian ini yakni ingin mengurai latar belakang terjadinya perpecahan antara NU dan Masyumi yang berujung pada keluarnya NU dari barisan Masyumi dan bahkan NU mendirikan partai sendiri. Termasuk juga mengungkap proses NU keluar dari Masyumi dan siapa tokoh yang getol dalam memperjuangkan NU keluar dari Masyumi.

Sumber kajian dalam tulisan ini yakni berasal dari buku-buku dan karya tulis lainnya, beberapa sumber dokumen hasil rapat dan pidato yang terkait dengan kegelisahan NU terhadap keberadaannya Masyumi dan adanya keinginan NU untuk keluar dari Masyumi. Dokumen-dokumen ini diperoleh dari beberapa sumber, khususnya bersumber dari perpustakaan PBNU. Dengan demikian, tulisan ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui perpecahan NU dan Masyumi yang bersumber dari naskah awal, sehingga bisa melihat dan memahami dinamika politik partai Islam menjelang Pemilu 1955. Inilah salah satu yang membedakan tulisan ini dengan tulisan-tulisan lainnya. Beberapa karya yang telah membahas permasalahan ini secara umum, baik yang ditulis oleh penulis Indonesia maupun penulis luar negeri, di antaranya buku yang ditulis M. Ali Haidar, A. Gaffar Karim dan Martin van Bruinessen. M. Ali Haidar dalam bukunya “Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik” membahas konflik yang terjadi antara NU dan Masyumi. Dalam salah satu bab buku (Bab IV) ini membahas mengenai kehidupan politik NU. Pertama tentang hubungannya dengan Masyumi setelah NU keluar tahun 1952 dan mendirikan partai sendiri. Dalam bab ini diungkapkan, kendati NU terlibat bersama organisasi Islam lainnya dalam kongres umat Islam tahun 1946 untuk mendirikan partai Islam Masyumi, tetapi akibat perselisihan politik

yang terjadi antara NU dengan kalangan Masyumi lainnya, NU menyatakan keluar dari partai itu dalam kongres NU tahun 1952. Diuraikan pula peranan NU setelah menjadi partai sendiri dalam percaturan politik nasional sampai sekitar tahun enam puluhan. “Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia” yang ditulis A. Gaffar Karim tahun 1995, juga mengurai tentang keberadaan NU di Indonesia. Gaffar menyebutkan bahwa NU bagi sementara orang diidentikkan dengan istilah “tradisional”, shalat dengan “usalli”, doa “qunut”, tarawih 23 rakaat, “tawasul” kepada para wali, dan seterusnya. Karena itu, barangkali masih sedikit yang memperhatikan bahwa di luar semua gambaran stereotip di atas, NU sebenarnya adalah salah satu denyut terpenting dalam totalitas kehidupan negeri ini. Gaffar mengungkapkan dengan keteguhannya (yang diimbangi dengan fleksibilitas) dalam memegang apa yang dengan nada sedikit minor disebut sebagai “tradisionalisme”, dan dengan segala kekhasan dalam gaya berpolitiknya, NU telah banyak mewarnai bukan saja wacana keagamaan, tapi juga latar sosial-kemasyarakatan, bahkan politik dan ideologi bangsa. Gaffar mengurai wajah NU dari tahun 1926-1984. Di dalam bab ini, Gaffar memaparkan proses terbentuknya NU dan bagaimana kemudian NU memasuki dunia politik yang selama ini hampir tidak tersentuh secara kelembagaan. Kendati dua dari empat tokoh pendiri MIAI (Madjlis Islam A'laa Indonesia) yang dibentuk pada 1937 adalah tokoh-tokoh NU, secara kelembagaan NU tidak terlibat. Keterlibatan keduanya hanya bersifat pribadi. MIAI yang dibentuk atas dasar keinginan untuk memperkuat tali persatuan umat Islam Indonesia ini kemudian mendapat sambutan secara kelembagaan NU setelah dua tahun kemudian. Asumsi Syafi'i Ma'arif, MIAI didirikan karena terdorong oleh contoh yang kompetitif dari golongan sekuler yang juga berusaha mempersatukan diri. Dalam perkembangannya kemudian, kuatnya tuntutan untuk ikut dalam politik, akhirnya dibentuklah Masyumi. Buku lain yang membahas mengenai NU dan perannya dalam perpolitikan di Indonesia berjudul “NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru” karya Martin van Bruinessen. Kendati buku ini terfokus pada perkembangan NU tahun 80-an, akan tetapi dalam beberapa bab ditemukan beberapa hal yang terkait dengan perpecahannya dengan Masyumi, terutama pada bab 2 yang mengurai masa “Empat Puluh Tahun Pertama Relasi Kuasa Di Masa Transisi Panjang”.

Secara umum, Martin van Bruinessen (1994) dalam bukunya menguraikan dengan cukup terinci keterabaian NU dari pandangan dunia yang disebut “modern”. Konsep “tradisional” dalam pandangan justru memberikan peluang besar bagi munculnya pandangan yang beragam. Ia menyesalkan betapa NU kerap hanya disebut secara sambil lalu, ketika sebuah kajian mestinya memberikan proporsi perhatian yang lebih pada NU. Beberapa karya yang disebutkan sebelumnya, memang membahas NU secara umum, sejak berdirinya, hingga Partai NU dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan kebijakan fusi partai yang diterapkan pemerintahan Orde Baru pada 1973. Oleh karena itu, dengan metode penelitian sejarah (heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi dan historiografi), konflik NU dan Masyumi, dengan spesifik akan diuraikan dalam tulisan ini, berdasarkan sumber-sumber primer yang ditemukan antara lain, Teks Putusan Mukhtar NU ke -19 di Palembang dan Laporan Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masyumi, serta ditambah sumber sekunder buku-buku dan karya tulis lainnya. Karena ini, dapat dipahami uraian mengenai konflik yang terjadi antara NU dan Masyumi, hingga masa Pemilu 1955.⁴⁵

B. Kebijakan Presiden Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Menurut falsafah demokrasi Presiden Soekarno, ada tiga pokok pokok yang tercakup di dalamnya. Yang pertama adalah pemberlakuan sistem pemerintahan dan kepemimpinan baru yang selanjutnya disebut demokrasi terpimpin. Untuk memperjelas konsep baru ini, saya telah menguraikan langkah-langkah penguatan kabinet gotong royong seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan melibatkan seluruh partai politik, termasuk pemerintah Indonesia. Tiga komponen utama Dewan Nasional adalah pegawai, yang terdiri dari: wakil buruh, tani, cendekiawan, pengusaha nasional, golongan agama, pemuda, angkatan bersenjata, wanita, dan wakil wakil daerah.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 357

Dewan Nasional adalah survei masyarakat yang komprehensif. Usulan pembentukan kabinet gotong royong adalah membangun kabinet dengan melibatkan semua pihak, termasuk PKI. Menurut Soekarno, ini adalah salah satu hasil utama revolusi, dan PKI harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan membantu membentuk kebijakan nasional. Hasilnya, akan terbentuk pemerintahan yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dan mungkin juga didukung oleh partai-partai kecil.

Dibandingkan dengan kabinet yang terus-menerus diserang oleh oposisi, Soekarno berpendapat bahwa kabinet yang lebih berkembang akan lebih mampu menjalankan kebijaksanaan politik nasional yang dapat dipertahankan dan meningkatkan kerukunan persatuan nasional. Menurut Soekarno, gotong royong merupakan ungkapan bahasa Indonesia yang menggambarkan masyarakat semurni-murninya negara tersebut. Salah satu gagasan Sukarno yang lain adalah penguburan partai politik pada tahun 1956, ketika semua partai kehilangan suara mereka dan semua guru sepakat bahwa ada empat puluh partai yang baik di negara ini dan kita semua harus berusaha melucuti senjata mereka.

Karena banyaknya partai yang terus-menerus menimbulkan instabilitas di kabinet dan pemerintahan, Soekarno tidak senang dengan sistem multipartai. Menurut Sukarno, ia ingin mendirikan tunggal atau pelopor pada awal masa kemerdekaan, namun cita-cita tersebut tidak mampu ia capai karena dianggap sebagai pesaing KNIP. Hal ini semakin didukung dengan lahirnya Pemerintahan Nomor X pada tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik yang menjadikan Soekarno gagal.

Artikel ini ditulis oleh M. Natsir, seorang ketua Masyumi. Natsir memberikan nasihat kepada Presiden Soekarno tentang sistem politik negara, demokrasi, dan prinsip-prinsip umum. Oleh karena itu, “selama demokrasi masih ada, akan selalu ada partai, meskipun mereka tidak setuju dengan keputusan pemerintah pada bulan November 1945.” Sebaliknya juga disebutkan bahwa selama masih ada kebebasan partai, maka demokrasi akan tetap terpelihara. Partai-partai dikubur kalau.

Otomatis demokrasi akan menjadi abadi. Dan dalam kuburan di atas, hanya pemerintahan saja yang disebutkan. Kiai Dahlan pada bulan November 1956 menyatakan bahwa penguburan partai-partai selaras dengan Islam. Penguburan partai-partai dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Imron Rosyadi, Ketua Pemuda Ansor (NU), indikator tersebut sejalan dengan Islam. Saya juga menekankan bahwa sistem pemerintahan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan urusan pribadi presiden. Imron Rosyadi, Jurnal Sosiologi, juga menyebutkan Dewan Nasional hanya digunakan untuk mendukung Soekarno.

Sejak saat itu, Soekarno kerap mengkritik demokrasi anggota dan sistem multipartai dengan pidato-pidatonya. Situasi politik yang semakin kritis di era ini, seperti perubahan konstitusi dan lembaga legislatif, memberikan peluang bagi Soekarno untuk turut serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memberlakukan Tindakan yang dikeluarkan Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya Kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS 1950
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Nasakom dan Manifesto Politik Indonesia USDEK merupakan dua konsepsi yang muncul dan berkembang pada saat Presiden Soekarno memberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin. Setelah mengeluarkan Dekrit, Soekarno menganggap jika Revolusi Indonesia telah ditemukan Kembali sebagaimana ia sampaikan dalam pidatonya “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Kemudian Soekarno mengembangkan doktrin-doktrinnya menjadi suatu yang lebih jelas sebagai suatu kebijakan yang mengatasnamakan revolusi. Nasakom dan

⁴⁶ Himawan Indrajat, *Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi*,) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 1: 53-62, September 2018.

Manipol USDEK itulah yang kemudian memiliki fungsi sebagai doktrin dan kebijakan untuk mencapai revolusi yang dimaksud oleh Soekarno tersebut.

1. Nasakom

Menurut Soekarno terdapat tiga haluan utama pergerakan rakyat Indonesia yang sudah ada sejak penjajahan Eropa, yaitu Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis. Soekarno mengatakan bahwa persatuan dari ketiga kekuatan tersebut akan menjadi suatu kekuatan yang “maha besar maha kuat, suatu tombak-taufan yang tak dapat ditahan terjangnya.”⁴⁷ Nasakom merupakan suatu ideologi yang murni lahir dari gagasan Soekarno terhadap persatuan dan revolusi. Nasakom menjadi suatu landasan baru disamping Pancasila dan menjadi tiang pondasi pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Nasakom dalam implementasinya memaksakan ketiga golongan untuk dapat saling bekerjasama di bawah suatu kepemimpinan yang memiliki kewenangan mutlak oleh Presiden Soekarno. Nasakom berjalan dengan memberikan keuntungan politik bagi golongan Komunis PKI yang semakin merapatkan barisannya dalam pemerintahan. Nasakom yang telah menjadi ideologi itu membuat golongan Islam terpaksa menerima PKI dan sebagian yang lain ada yang tetap bersikukuh menolaknya namun berakhir pada pembungkaman.

2. Manifesto Politik Indonesia USDEK

Penjelasan mengenai USDEK selain diuraikan pada pidato Presiden juga diperjelas melalui buku pedoman sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dalam buku tersebut setidaknya penulis dapat menyimpulkan terkait UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Pertama, penggunaan UUD 1945 sebagai konstitusi adalah hal yang sudah sewajarnya dilakukan untuk mengikis liberalisme. Kedua, Sosialisme Indonesia pada intinya adalah tentang mencapai Indonesia yang ‘ber-Sosialisme Indonesia’ dan bersih dari Kapitalisme, lebih

⁴⁷ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Banana Books, 2016, hlm. ii.

lanjut Soekarno menegaskan “Bagi orang Revolusioner sejati tidak peduli bila ada yang meng-cap ‘kiri’ atau meng-cap ‘komunis’, asal saja baik untuk rakyat Indonesia kita laksanakan. Dan semua orang revolusioner adalah orang ‘kiri’. Ketiga, Demokrasi Terpimpin yang Soekarno katakan mengenai hal ini adalah “Suatu Revolusi hanya dapat berlangsung dan berakhir secara baik, jika ada satu Pimpinan yang Revolusioner”.⁴⁸ Keempat, Ekonomi Terpimpin merupakan menjadikan negara sebagai pemegang atas pengelolaan sumber daya dan perusahaan-perusahaan.²⁰ Kelima, Kepribadian Indonesia yang disimpulkan oleh Soekarno adalah tentang ‘Gotong Royong’ sebagaimana yang ia sampaikan “Gotong royong bukan sekedar satu sifat kepribadian Indonesia, gotong royong bukan sekedar corak daripada *Indonesian Identity!*, gotong royong adalah juga satu keharusan dalam perjuangan melawan imperialisme dan kapitalisme, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Oleh karena itu Saya tegaskan perlunya persatuan dan kegotong royongan antara golongan Islam, Nasional, dan Komunis”. Presiden Soekarno kemudian melakukan Retooling terhadap lembaga negara, dan partai-partai. Salah satu bentuk retooling tersebut dalam dengan membentuk Front Nasional secara khusus dengan Penpres No. 13 Tahun 1959. Pembentukan organisasi ini kemudian menjadikan Manipol-USDEK semakin kuat sebagai ideologi ataupun haluan negara. Manipol-USDEK dijadikannya asas dari Front Nasional,⁴⁹ yang mana organisasi ini memiliki wewenang khusus yang diberikan oleh Presiden Soekarno yaitu, :

- a. Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat serta memimpin gerakan masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, keamanan, dan pertahanan.
- b. Menyelenggarakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.⁵⁰

⁴⁸ Departemen Penerangan RI, (1961), “Pedoman-Pedoman Pelaksanaan....”, hlm. 13.

⁴⁹ Departemen Penerangan RI, (1960), “Amanat Presiden Soekarno Pada....”, hlm. 3.

⁵⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 13 Tahun 1959 Tentang Front Nasional.

Dalam susunan pengurus besar Front Nasional ini juga telah terlihat Poros Nasakom dengan adanya Ali Sostroamidjojo dari PNI, K.H. Idham Khalid dari Nu, dan D.N Aidit dari PKI. Dengan demikian Manipol- USDEK juga memiliki corong suara yang secara langsung dihadapkan kepada masyarakat. Retooling yang selanjutnya adalah dengan membubarkan Masyumi dan PSI yang tidak mau menyesuaikan diri dengan Manipol-USDEK.⁵¹ Dalam proses mencapai revolusi tersebut bahkan Soekarno melakukan pembaharuan susunan DPR dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) sebagai bentuk dari pelaksanaan Manipol Usdek. Kebijakan Soekarno tersebut tentu mendapat penolakan dari pihak-pihak bahkan dianggap melanggar Konstitusi namun, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Manipol adalah pancaran dari Pancasila dan juga telah disahkan sebagai Haluan Negara.

C. Lahirnya Ideologi Nasakom

Nasakom merupakan akronomi dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Nasakom merupakan konsep politik yang digunakan oleh Bung Karno selama masa Demokrasi Terpimpin untuk mempersatukan bangsa dan menjaga keutuhannya, dalam menuntaskan Revolusi Indonesia dan upaya melawan penindasan Imperialisme dan Neokolonialisme yang ingin kembali menguasai Indonesia. Pandangan Nasakom Bung Karno sendiri sebenarnya telah tergambarkan jauh sebelum era Demokrasi Terpimpin, tepatnya pada tahun 1926 ia menulis sebuah artikel tentang persatuan tiga konsep utama poros gerakan pra kemerdekaan, yaitu Nasionalis, Islamis dan Marxisme.

Sebagaimana yang ditulis Bung Karno dalam bukunya *Di bawah Bendera Revolusi*. ”Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu membuktikan bahwa tiga haluan ini dalam suatu Negara jajahan tidak guna berseteru satu sama lain, membuktikan pula bahwa gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha-besar dan

⁵¹ Departemen Penerangan RI, (1960), “Amanat Presiden Soekarno Pada....”, hlm. 22-23

maha-kuat, satu ombak-taufan yang tidak dapat ditahan terjangannya, itulah kewajiban yang harus kita semua memilikinya. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu; entah pula bagaimana rupanya persatuan itu; akan tetapi tetaplah, bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia Merdeka itu, ialah kapal-kapal persatuan adanya”.⁵²

Soekarno menjadikan Nasakom sebagai alat untuk memperkuat sistem Demokrasi Terpimpin dengan membuatnya sebagai dasar atau poros pada pemerintahan.⁵³ Jika penulis simpulkan maka, Sosi-Nasionalisme merupakan ‘NAS’, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ‘A’, dan Sosio-Demokrasi merupakan ‘KOM’. Dengan demikian Soekarno berusaha mesinkretiskan ketiganya menjadi suatu ideologi yang utuh yaitu NASAKOM. Nasakom sudah menjadi ideologi persatuan yang ditetapkan secara pribadi oleh Soekarno. yang demikian menyebabkan golongan Islam tidak dapat menolak keikutsertaan Komunis (PKI) dalam pemerintahan dan ‘terpaksa’ bekerja sama mengikuti konsepsi Pemerintahan Demokrasi Terpimpin karena kekuatan politik utama sistem tersebut berada di dalam diri Soekarno sebagai Presiden.

Sehingga yang demikian penulis simpulkan tidak ada yang benar-benar menerima Nasakom dengan yakin dan sepenuh hati. Poros Nasakom selain sebagai ideologi persatuan juga menjadi alat Soekarno untuk menyeimbangkan kekuatan politik dalam pemerintahan antara ketiga golongan yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis.⁵⁴ Nasionalis adalah golongan yang terdiri dari partai politik berhaluan Pancasila dan dinamika mengenai sebuah ideologi sering terjadi di Indonesia. Ideologi-ideologi itu muncul sejak zaman pergerakan dan bahkan terus berkembang pasca Indonesia merdeka. Sosialisme, Marxisme, Komunisme, Nasionalisme, Islamisme, Marhaenisme dan Pancasila merupakan beberapa

⁵² Soekarno tentang “*Nasionalisme, Islam, Marxisme*” dalam bukunya, *Di bawah Bendera Revolusi* (Jakarta, 1964), h. 1-23.

⁵³ Lingga Winata, “*Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1966*”, *Jurnal Pendidikan Sejarah AVATARA*, (Vol.5 No. 3 Oktober 2017), Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 731.

⁵⁴ Sudarwanto Pujosantoso, *Demokrasi Liberal (1950-1959)*..., hlm. 67-68. Lihat Juga Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81.

ideologi yang berkembang. Penelitian mengenai dinamika yang terjadi antar ideologi sangat menarik karena akan menunjukkan betapa sengitnya rivalitas yang terjadi. Rivalitas yang biasanya sering terjadi yaitu antara aliran Nasionalis, Islamis dan Marxis seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno dalam artikelnya yang berjudul Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Namun akhirnya Pancasila muncul sebagai ideologi terbuka yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.⁵⁵

Penelitian mengenai Pancasila sering dilakukan dan tentunya menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Perkembangan Pancasila juga menimbulkan dinamika yang menarik. Pancasila pernah tersaingi oleh konsep Nasakom yang dikeluarkan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin dan Pancasila juga pernah digunakan sebagai alat legitimasi pemerintahan Soeharto. Penelitian kali ini tidak terfokus pada kajian Pancasila melainkan pada konsep yang menyainginya pada masa demokrasi terpimpin yaitu Nasakom. Pada demokrasi terpimpin Soekarno menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan semuanya terpusat kepadanya.⁵⁶

Soekarno menganggap Revolusi Indonesia ditemukan kembali pada masa ini. Sebuah konsep yaitu Nasakom muncul sebagai jargon politik Soekarno saat itu. Nasakom muncul setelah Indonesia diombang-ambingkan oleh beberapa masalah dan membuat Indonesia melenceng dari apa yang telah dicita-citakan yaitu menciptakan masyarakat sejahtera adil dan makmur. Sebelum Nasakom muncul Indonesia mengalami ketidakstabilan politik dan juga banyak mendapat ancaman akan kehancuran integritas bangsa. Agresi militer satu dan dua serta beberapa pemberontakan yang terjadi merupakan contoh kejadian yang mengancam integritas bangsa.⁵⁷

⁵⁵ Daniel Dhakidae, dkk, *Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*, Kompas Jakarta, 2013, Hlm 34.

⁵⁶ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Hlm 39.

⁵⁷ Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Nasakom*, Garasi, Yogyakarta, 2008, Hlm 131.

Nasakom bukan ajaran Bung Karno, tapi adalah ide Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa agar tak terpecah belah. Ide nasakom sebetulnya sudah lama ada di dalam benak Soekarno, yaitu ketika beliau masih di Partai Sarekat Islam (PSI). Pada saat itu PSI terpecah menjadi dua kekuatan, yaitu: PSI Merah menginginkan agar PSI juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan PSI putih hanya ingin berdakwah saja. Pada saat itulah Soekarno dengan pidatonya yang memukau mulai meneriakkan ide Nasionalis-Islam-Marxis yang kemudian hari menjadi Nasionalis-Agama-Komunis. Ketika itu di Indonesia terdapat banyak partai yang platformnya terbagi dalam tiga kelompok, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Misalnya, di Nasionalis ada PNI, Agamis ada Masyumi/NU dan Komunis ada PKI. Dan pada dasarnya ketiga faham ini tidak dapat disatukan, khususnya antara Agamis dan Komunis. Bagi Soekarno, perubahan akan terjadi di dalam masyarakat apabila ketiga kekuatan politik tersebut dapat bersatu dalam satu konsep yaitu “Nasakom”.⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian Dampak Nasakom Terhadap Keadaan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966, penulis menarik kesimpulan bahwa Sukarno sebagai tokoh utama dalam masa Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap keadaan politik Indonesia pada masa itu. Sukarno yang pada yang sangat membenci kolonialisme dan imperialisme mulai mencoba menyerap dan menyatukan tiga ideologi besar pada masa kolonial Belanda tahun 1920-an yaitu Nasionalisme, Islam, dan Marxis, yang tidak lain adalah untuk melawan dan memberantas penjajahan pada masa itu. Sukarno yang sejak mulai masa mudanya sudah aktif dalam organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan dan menempuh pendidikan di Surabaya maupun Bandung. Sukarno berkesimpulan bahwa kemerdekaan dan revolusi Indonesia baru akan tercapai ketika dua konsep besar yang mempengaruhi pergerakan Indonesia yaitu Islam dan Marxisme di persatukan kedalam konsep Nasionalisme. Artinya kepentingan bangsa harus di letakkan diatas kepentingan golongan-golongan lainnya baik itu agama maupun paham-paham lainnya.

⁵⁸ Alfian. *Pemikiran dan perubahan politik Indonesia* , (Jakarta : PT. Gramedia, 1978), hlm 115

Nasakom hasil dari buah pemikiran Sukarno ini lahir disebabkan oleh kondisi sosial pergerakan di Indonesia. Saat itu pergerakan yang menuntut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah (Belanda) terpecah-pecah kedalam berbagai organisasi. Organisasi ini kemudian bergerak sendiri-sendiri dengan caranya masing-masing. Tidak adanya persatuan dalam gerakan yang memiliki tujuan yang sama ini akhirnya dapat dipatahkan dengan mudah oleh Belanda baik melalui cara persuasif hingga cara-cara yang represif. Sukarno memiliki latar belakang keyakinan Islam, Ia juga tumbuh dalam lingkungan pergerakan Sarekat Islam, namun Sukarno melalui bacaan-bacaan dan diskusinya juga menyimpan kekaguman yang besar terhadap pergerakan Komunisme yang lahir dari buah pemikiran Karl Marx.

Tetapi, untuk mengaplikasikan pemikiran Marx dalam konteks Indonesia, maka Marxis itu menurut Sukarno harus dicocokkan dengan mentalitas, kepribadian dan kondisi sosial/budaya yang ada di Indonesia sendiri. Artinya Sukarno memandang bahwa komunisme haruslah dilandaskan kepentingan Nasional bukan kepentingan internasional sebagaimana tafsiran Marxis-Leninis yang menjadi kiblat partai komunis dunia. Selain itu untuk mencapai bentuk Negara Sosialisme yang adil dan makmur maka mutlak perlunya persatuan diantara kaum Nasionalisme, Agama, dan Komunisme untuk melawan kapitalisme dan penjajahan dari negara-negara Imperialisme Eropa.

Nasakom kemudian menjadi ambisi dan cita-cita politik Sukarno selama masa pergerakan pra-kemerdekaan hingga ke masa revolusi Pasca-Kemerdekaanyaitu sampai pada masa Demokrasi Terpimpin. Tidak mudah bagi Sukarno untuk mengaplikasikan pemikirannya tersebut. Tajamnya perbedaan di antara ketigagolongan ini dan pertentangan-pertentangan dari tokoh-tokoh lain membuat Sukarno tidak serta-merta mampu mengaplikasikan pemikirannya kedalam sistem politik Indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin itu sendiri, Nasakom kemudian menjelma menjadi sebuah alat Sukarno dalam mempertahankan posisinya yaitu dengan penggalangan massa dari beberapa golongan dari ketiga ideologi tersebut. Sistem Parlemen yang tidak sesuai

dengan jiwa bangsa Indonesia menjadi salah satu peluang Sukarno untuk menerapkan Demokrasi Terpimpinnya. Namun dalam perjalanannya Demokrasi ini mendapat banyak kritikan karena sikap Sukarno yang mengarah pada kekuasaan sentralistik pada masa itu. Dimana pada masa Demokrasi Terpimpin jalannya pemerintahan tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan UUD 1945 yang murni.

Selain itu banyaknya golongan-golongan yang lebih mengutamakan kepentingannya membuat pemerintahan berjalan tidak stabil, paraktis dalam masa kurang dari sepuluh tahun Indonesia mengalami tujuh pergantian kabinet. Menyikapi hal ini Sukarno kemudian mengambil alih penuh jalan pemerintahan dengan memberlakukan SOB. Kemudian menumpas pemberontakan-pemberontakan melalui dukungan Militer, dan kelompok-kelompok Komunis. Tahun 1959 Sukarno resmi menjadi pemegang kekuasaan penuh melalui dekrit dan membentuk Demokrasi Terpimpin dengan doktrin persatuan“Nasakom”nya. Melalui Konsep Nasakom inilah Komunisme (PKI) masuk dan mulai membangun dominasi kembali pasca pemberontakan Madiun dengan jalan Kolaborasi. Di satu sisi pergerakan Islam yang di pelopori oleh Masyumi kian melemah akibat tudingan keterlibatannya dalam pemberontakan-pemberontakan DI/TII dan PRRI-Permesta. Jika ditinjau dari konteks tahun 1959-1965 dominasi kaum Komunis tidaklah mutlak disebabkan oleh sikap Sukarno yang dengan sengaja ingin membawa Komunis menjadi ideologi Negara.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, selain keyakinannya akan persatuan kedalam doktrin Nasakom, saat itu Sukarno juga dihadapkan pada kondisi perang dingin dimana Negara Adidaya saling berebut memperoleh pengaruh dinegara-negara berkembang. Sukarno yang menolak Imprealisme melakukan politik konfrontasi dengan menegaskan bahwa dunia tidak harus terbawa dalam pertikaian blok barat dan timur. Sukarno merumuskan konsep baru untuk mendoktrin pergerakan dunia ketiga yaitu NEFO dan OLDEFO. Sukarno dan PKI yang memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menghancurkan Imprealisme/kapitalisme itu sendiri membawa keduanya menjalin kedekatan dan saling

membantu untuk meruntuhkan hegemoni Imprealisme. Kedekatan Ideologi Sukarno dan Program PKI berimplikasi pada praktek politiknya. Dimana kedua membentuk kolaborasi dan sepakat melakukan agitasi dalam setiap kebijakan yang dilahirkan. Selain itu, mereka menunjukkan sebuah kemelekatan yang kuat dan abadi dalam persatuan Nasionalisme, sebuah perasaan anti-Imprealis yang mendalam, sebuah keyakinan kalau hanya semangat revolusi yang dimiliki anak muda radikal masa itu yang sanggup membuat Negara mereka kuat, bersatu dan sosialis. Nasakom merupakan tema yang menjadi ambisi dan cita-cita politik Sukarno yang menjadi doktrin revolusi Indonesia di tahun 1959-1966, Namun kemudian dielaborasi oleh PKI Sebagai bagian dari doktrin tersebut untuk menjalankan kepentingan partainya sendiri tanpa memandang Islam dan golongan-golongan lainnya.⁵⁹

D. Proses Kristalisasi Partai-Partai Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kabinet Djuanda adalah kabinet peralihan dari periode Demokrasi Parlementer Demokrasi Terpimpin. Dalam kabinet Soekarno ini, Djuanda tetap diberi posisi penting sebagai Menteri Pertama yang tugasnya tidak terlalu berbeda dengan tugas Perdana Menteri. Kabinet inilah yang bertugas melaksanakan gagasan Soekarno dalam bentuk Demokrasi Terpimpin. Demokrasi gaya baru ini telah membawa Soekarno ke puncak kekuasaan yang memang sudah lama ia dambakan, tapi karena fondasinya tidak kokoh, sistem itulah yang akhirnya membawa kehancuran. Sekitar enam setengah tahun sistem ini beroperasi dalam sejarah kontemporer Indonesia, secara politik umat Islam tidak saja berbeda pandangan, bahkan terpecah-pecah berhadapan dengan sistem yang diciptakan Soekarno.

Sikap Masyumi yang menentang ide Demokrasi Terpimpin sementara NU, PSII, dan Perti turut serta di dalamnya. Masyumi yang beraliansi dengan partai-partai kecil seperti PSI dan Partai Katolik jelas tidak bisa menolong posisi politiknya. Secara mikro, di

⁵⁹ Bancin, Rio Sanggirta (2017) *Dampak Nasakom Terhadap Keadaan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966*. Hal 89-92

kalangan umat Islam, proses kristalisasi juga menjadi kenyataan. Soekarno menganggap bahwa Masyumi dan adalah “Kepala Batu” yang harus disingkirkan, sedangkan NU dan partai Islam yang mendukung sistem demokrasi Soekarno ini hanya dianggap sebagai peran pinggir, bukan peran utama. Sebenarnya golongan Islam hanyalah untuk meramaikan jargon Nasakom: suatu bentuk kerjasama semu dan dipaksakan.⁶⁰ Namun dibalik itu dalam Majelis Konsituante, partai-partai Islam pada umumnya dapat menggalang kekompakan sesama mereka, khususnya pada waktu memperjuangkan islam atau Pancasila ala Piagam Jakarta sebagai dasar Negara.

Setelah DPRGR berdiri pada bulan April 1960, proses kebangkitan politik di kalangan masyarakat mendapat dorongan kritis dan persuasif, dan mencapai puncaknya pada akhir tahun 1960, ketika Masyumi lahir. Selanjutnya kita bahas juga awal mula masa kerja sama antara Soekarno dengan partai-partai Islam yang terus berlanjut hingga berakhirnya era Demokrasi Terpimpin. Pernyataan NU mengenai keberadaan DPRGR sejalan dengan sila “amar ma’ruf nahi munkar”.

Secara praktis, tujuan NU adalah mendokumentasikan secara lengkap jumlah wakil Islam di DPRGR dibandingkan dengan golongan wakil lainnya. Dalam hal ini, dukungan NU terhadap ketaatan Islam terhadap demokrasi Soekarno semakin menguat. Kemampuan NU menjaga keutuhan Terpimpin Demokrasi tidak bisa dijelaskan dengan kemampuan para pemimpinnya menjaga hubungan privat dengan Presiden Soekarno. Berkat saling pengertian yang berlandaskan prinsip budaya Jawa, mereka mampu menjalin hubungan dengan kesetiaan yang tinggi. Menurut Soekarno, ikut memainkan peran di belakang layar ketika NU pada tahun 1952 menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keluarnya Masyumi.⁶¹ Dua tokoh utama NU yang mempelopori pemisahan ini, yaitu; K.H Wahab Chasbullah dan K.H A. Wahid Hasyim adalah juga tokoh-tokoh NU yang menjalin hubungan pribadi dengan Soekarno.

⁶⁰ Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Politik : teori belah bambu masa demokrasi terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 46.

⁶¹ Kanumoyoso, Bondan. *Kepemimpinan di dalam NU Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. (Jakarta: UI Press, 1996), hlm.99.

Mengenai K.H. Wahid Hasyim dan Soekarno memiliki sejarah bersama yang dibahas di BPUPKI. Hal ini menjelaskan mekanisme hubungan sektor swasta yang sering disebut sebagai keputusan politik. Alhasil, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa Sukarno ingin mengeluarkan NU dari Masyumi. Hubungan NU dan Soekarno juga disebutkan dalam Alquran Partai NU, Duta Masyarakat. Hampir semua pernyataan Sukarno pada periode ini didukung oleh pimpinan NU. Misalnya Konfortasi Irian Barat dengan Malaysia, perusahaan asing, Deklarasi Ekonomi (Dekon), dan keikutsertaan Indonesia di PBB.

Partai-partai Islam menempuh jalan bersibak dua, Sementara Soekarno memainkan kartunya menjelang dektrit di luar DPR dan Majelis Konstituante, wakil-wakil rakyat dalam majelis pembuat UUD ini sedang berdebat hangat tentang masalah-masalah kenegaraan, seperti bentuk negara, dasar negara, hak-hak asasi, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan persoalan-persoalan mendasar tentang kenegaraan. Menurut Majelis Konstituante, umat Islam pada umumnya mempunyai kemampuan untuk bekerja sama, terutama pada saat Islam atau Pancasila ala Piagam Jakarta ditegaskan sebagai simbol negara. Namun, baik di DPR maupun di tempat lain, faksi-faksi Islam nampaknya belum memiliki bahasa yang sama ketika membicarakan perubahan politik yang sedang terjadi. Partai Liga Muslimin (NU, PSII, dan Perti) semakin vokal menentang langkah politik Soekarno, sementara Masyumi yang sudah semakin kuat terus menyuarakan keprihatinan terhadap gagasan dan pelaksanaan Terpimpin Demokrasi. Alhasil, Masyumi menjadi syahid daripada menyerah. Namun seperti yang telah kami tunjukkan, jalan ini memiliki sejumlah permasalahan yang merugikan perkembangan demokrasi Indonesia. Sekiranya Masyumi dapat lebih sabar dan tidak “tenggelam” dalam arus idealism martir, barang kali sistem demokrasi tidak akan tersingkir begini parah dalam sejarah modern Indonesia.

Sebelum lebih detail mengenai perbedaan akidah masyarakat Islam dengan prinsip dan praktik Demokrasi Terpimpin, saya ingin membahas beberapa ciri-ciri demokrasi yang diuraikan sesuai dengan nilai-nilai Bangsa Indonesia. Setelah memahami apa itu terpimpin

dan bagaimana penerapannya, saya kemudian dapat menjelaskan bahwa sistem ini belum tentu demokratis dalam arti ditentukan oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan pada asas-asas rakyat.

Bersamaan dengan propaganda Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengkritik gagasan dan praktik liberal secara lugas, yang akibatnya menjauhkan Indonesia dari tujuan revolusi yang pada akhirnya akan mencapai massa yang adil dan sejahtera. Sejak saat itu, Soekarno mencermati prinsip-prinsip politik. Biang keladi semua --menuurutkan-- tidaklah ada demokrasi liberal yang barat, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara timur di dunia. Karena Indonesia adalah negara Timur, maka sistem demokrasinya juga harus ramah terhadap Timur. Menurut argumentasi Soekarno dengan George Mc Turnan Kahin, demokrasi Timur, khususnya demokrasi Indonesia, ditandai dengan penindasan oleh kelas penguasa. Kadang-kadang dikatakan bahwa “Demokrasi Indonesia sejak awal adalah Demokrasi Terpimpin. Orang tentu akan mempersoalkan apakah pada zaman purbakala pernah ada demokrasi di Nusantara ini, sebutlah itu Demokrasi Terpimpin misalnya, sebagaimana Soekarno berdalil. Tapi yang penting, kreasi sistem politik Soekarno mau dicari justifikasinya pada peninggalan nenek moyang yang kabarnya serba terpimpin. Boleh jadi serba terpimpin, tapi mengaitkannya dengan demokrasi modern jelas merupakan hal yang terlalu di cari-cari.

Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 yang bertajuk “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Soekarno menguraikan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam dua kategori:

1. Setiap orang diharapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara umum;
2. Setiap orang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan bangsa..⁶²



⁶² Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Politik : teori belah bambu masa demokrasi terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 51-51.